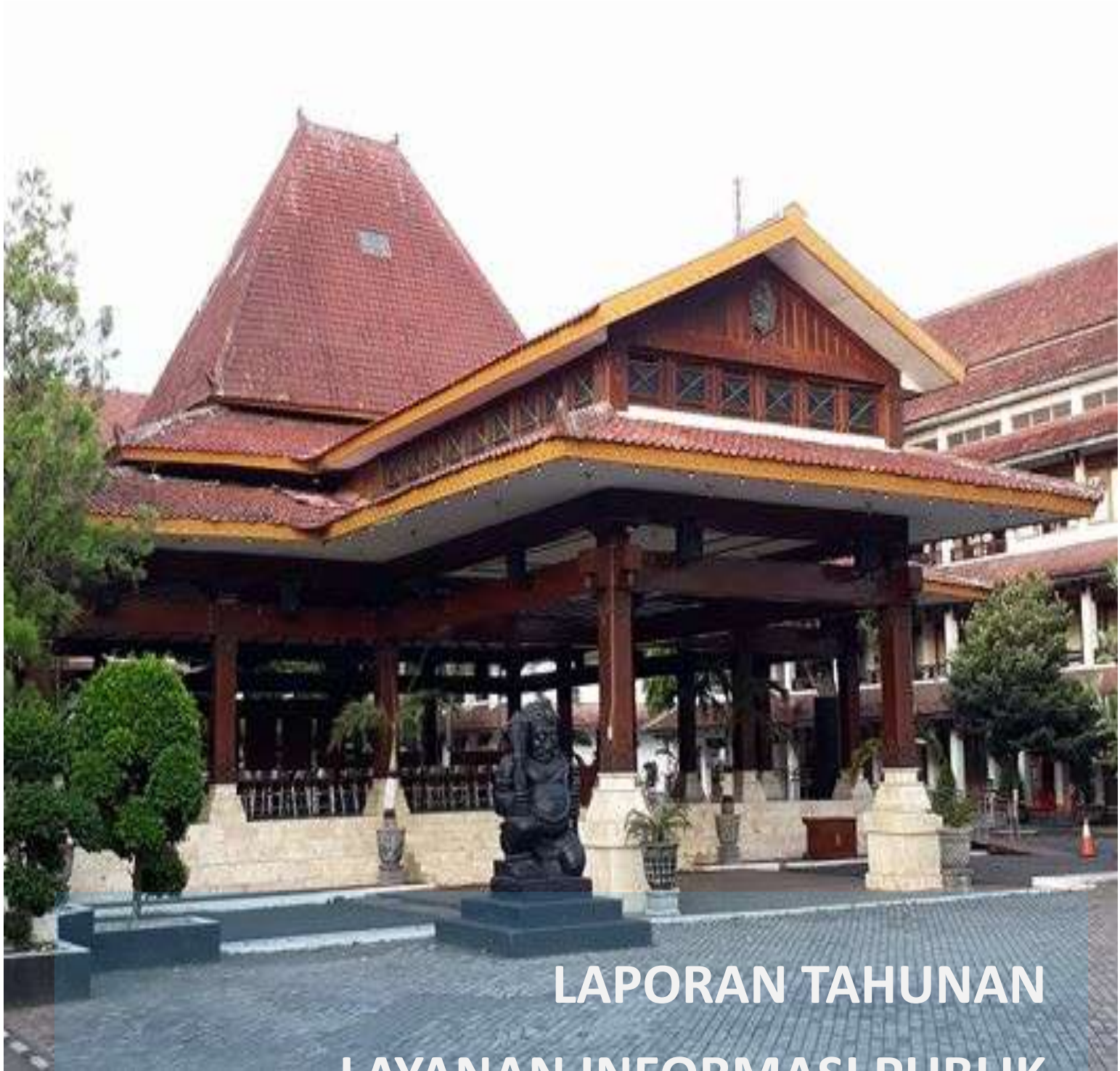




BAPPEDA

Kab. BANTUL



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019

Daftar Isi

KEBIJAKAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

PELAKSANAAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA

INFORMASI DI JUDI TV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

06

REKOMENDASI DAN RENCANA

TINDAK LANJUT

01

02

03

04

05

Setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sebagaimana amanat undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, keberadaan undang-undang ini sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Bappeda No. 34 / KPTS Tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul , PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. Petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, banner alur pelayanan informasi dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Bappeda juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui e-mail bappeda@bantulkab.go.id dan data informasi PPID yang tersedia di website <https://bappeda.bantulkab.go.id/>. Pemohon Informasi dapat mengakses website atau datang langsung ke ruang layanan Informasi Publik. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dapat juga melalui layanan telepon ke (0274) 367533 pswt 302 ke Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID, Bappeda Kabupaten Bantul didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 34/KPTS/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, sebagaimana terlampir pada laporan ini. Struktur PPID menurut Kepala Bappeda di atas terdiri dari Kepala PPID, Sekretaris, Petugas Meja Informasi, dan Petugas Dokumentasi.

Sumber Daya Pengelola Layanan Informasi

Pelayanan informasi publik didukung dengan dana sebesar Rp.130.250.000,- digunakan untuk publikasi media sosial dan radio, serta dana sebesar Rp.2.100.000,- digunakan untuk rapat.

01

Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama Tahun 2019, PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menerima 35 pemohon .

DAFTAR PEMINTA INFORMASI

SKPD : BAPPEDA KAB. BANTUL

Waktu : Januari s.d Desember 2019

No	Hari / Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan penggunaan informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi yg dimiliki		Jenis Permohonan		Keterangan
								Ada	Tidak	Soft copy	Hard copy	Melihat/ mengetahui	Meminta salinan	
1	Rabu/02 Januari 2019	Parpun	Dispusip		PNS	LKPJ		√		√			√	
2	Jumat/08 Februari 2019	Ndaru	Humpro	081227722996	Staf	Buku	Untuk kenang-kenangan	√			√			√
3	Senin/11 Februari 2019	Sinau	Humpro	082137824391	Staf	Profil Bantul	Untuk kenang-kenangan	√			√			√
4	Jumat/1 Maret 2019	BKAD	Kompek Parasamya			Permohonan Data	Permohonan Data	√			√			√
5	Rabu/13 Maret 2019	Siti Walkidah	Kec. Sanden	081328169504	PNS	Peta Kec. Sanden	Desa drafting	√			√			√
6	Kamis/14 Maret 2019	Harmidanto	BKAD	081328899948	PNS	Profil Daerah		√			√			√
7	Kamis/14 Maret 2019	Syarifah	Kec. Kretek	087839337126	PNS	Profil Daerah	Kunjungan ke Bandung	√			√			√
8	Jumat/4 April 2019	Rahmaditya Diaz	Univ. Esa Unggul	085921007165	Mahasiswa	Peta data	Penelitian	√			√			√
9	Rabu/14 Agustus 2019	Yusuf H	Kec. Pajangan	085225978220	ASN	Peta Pajangan	Dokumen	√			√	2		√
10	Senin/19 Agustus 2019	Andri	Yogyakarta	082226882503	Swasta	Laporan Kinerja	Penelitian	√			√			√

DAFTAR PEMINTA INFORMASI

SKPD : BAPPEDA KAB. BANTUL

Waktu : Januari s.d. Desember 2019

No	Hari / Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan penggunaan informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi yg dimiliki		Jenis Permohonan		Keterangan
								Ada	Tidak	Soft copy	Hard copy	Melihat/ mengetahui	Meminta salinan	
11	Rabu/28 Agustus 2019	Risman	UGM	081273049901	Mahasiswa	Peta dan Data	Penelitian	√			√			
12	Senin/2 September 2019	Aryani Dewi	Dalitbang Bappeda		CPNS	RKPD 2020	Penyusunan Laporan	√		√			√	
13	Jumat/20 September 2019	Syarifah	Kec. Kretek		PNS	Renstra Perubahan	Publikasi Renstra	√		√			√	
14	Kamis/3 Oktober 2019	Ka.Bag. Adm.Pem	Bag. Adm. Pem		PNS	Jawaban Pertanyaan Kajian Lapangan	Mengetahui data hasil kajian lapangan	√		√	√		√	
15	Senin/7 Oktober 2019	Saptono	RSUD PS		PNS	Renja	Publikasi Renja tahun 2020	√		√			√	
16	Rabu/9 Oktober 2019	Edy S	CV. Bangun Cipta Persada	083869511810	Konsultan	Data	Penelitian	√			√			
17	Kamis/10 Oktober 2019	Devika R	CV. Wika Sadewa	0818804228923	Swasta	Data studi	Untuk kajian	√						
18	Jumat/11 Oktober 2019	Aris NL	UGM-PSKK	085736025314	Swasta	Data BDT	Penelitian	√						
19	Jumat/11 Oktober 2019	Haris	CV. Vajra Amarta R	0857997597	Swasta	Data RTRW	Untuk kajian	√						

DAFTAR PEMINTA INFORMASI

SKPD : BAPPEDA KAB. BANTUL

Waktu : Januari s.d. Desember 2019

No	Hari / Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak	Pekerjaan	Informasi yg diminta	Tujuan penggunaan informasi	Status Informasi		Bentuk Informasi yg dimiliki		Jenis Permohonan		Keterangan
								Ada	Tidak	Soft copy	Hard copy	Melihat/mengetahui	Meminta salinan	
23	Senin/15 Oktober 2019	Sudiman	Kominfo		Staf	Pengambilan profil		√			√		√	
24	Jumat/18 Oktober 2019	Ariza	DKUKMP	089637800088	Staf	Pengambilan buku	Untuk kajian	√						
25	Selasa/22 Oktober 2019	Aditya Satiya WST IAP	Jl. Grafika teknik Utara No. 2 UGM	081393710500	Asisten Peneliti	Data SHP Peta RDTR, RTRW	Riset kawasan sesar opak pasca gempa	√		√			√	
26	Selasa/22 Oktober 2019	Salshabila	Jl. Glagah Sari	082293157010	Mahasiswa	Data Potensi	Tugas studio perencanaan wilayah kab. 5	√		√			√	
27	Selasa/22 Oktober 2019	Lilla Fitri A	Jl. Glagah Sari	085200270830	Mahasiswa	Data SHP	Tugas studio perencanaan wilayah kab. 5	√		√			√	
28	Jumat/1 November 2019	Bappelitbang Tabanan	Bappelitbang Tabanan		Instansi	Kisi-kisi informasi dan data studi komparasi	Mengetahui maksud dan tujuan studi banding	√		√			√	
29	Kamis/26 November 2019	Andiko	Ekosarpras Bappeda		PNS	Bahan rakor ranwal Renja	Sosialisasi awal Renja 2021	√		√			√	
30	Rabu/27 November 2019	Semua Kecamatan	Kecamatan		Instansi	Data penyusunan usulan PIK	Sosialisasi penyusunan PIK	√		√		4	√	
31	Kamis/5 Desember	Elvita Safitri	Jl. Pogung	081215751441	Mahasiswa	Data SHP	Penentuan lokasi	√		√			√	

02

Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan

Selama tahun 2019 semua permohonan informasi publik di Bappeda dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang diamanatkan oleh UU KIP. Atau dengan kata lain tidak ada permohonan informasi publik yang dilayani melampaui waktu yang ditentukan.

03

Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Berdasarkan data selama tahun 2019 permohonan Informasi publik yang dikabulkan oleh PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebanyak 35 pemohon.

04

Jumlah Informasi Publik yang Ditolak

Selain terdapat permohonan yang dikabulkan adapun permohonan yang ditolak oleh PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak ada.



Jumlah Keberatan yang Diterima

Tidak ada

Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Tidak ada

Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi yang

Tidak ada

Hasil mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi yang Berwewenang dan Pelaksanaannya oleh Badan Publik

Tidak ada

Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Tidak ada

Hasil Putusan Pengendalian dan Pelaksanaannya

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

01

Pemahaman terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data belum secara optimal merata di seluruh unit kerja;

02

Koordinator Unit Kerja yang ditunjuk belum semua berkontribusi secara maksimal, sehingga data dan informasi dari setiap Unit Kerja belum tersedia secara lengkap;

03

Kendala teknis pada Layanan E-PPID, menyebabkan alur permintaan informasi, verifikasi pemohon dan pengiriman informasi yang diminta pemohon tidak dapat dilaksanakan melalui aplikasi E-PPID.



Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

01

Plan A

Workshop dan Bimbingan Teknis mengenai UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi pengelola dan koordinator unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

02

Plan B

PPID terus bersinergi melakukan koordinasi dan pembinaan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada Koordinator PPID Unit Kerja, agar mempercepat dalam merespon dan memberikan jawaban atas permintaan informasi publik mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi;

03

Plan C

Pengembangan aplikasi layanan E-PPID dan pengelolaan database informasi PPID.

04

Plan D

Sertifikasi ISO 9001: 2015

Upaya untuk meningkatkan pengelolaan PPID Utama guna memberikan layanan yang lebih baik lagi terus dilakukan. Upaya tersebut diwujudkan dengan dipenuhinya beberapa persyaratan Sistem Manajemen Mutu yang berstandar internasional. PPID Bappeda berupaya memenuhi dokumen yang dipersyaratkan dalam ISO 9001 : 2015. Dokumen yang belum ada, segera dibuat, seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir lainnya. Setelah dokumen yang dipersyaratkan dipenuhi kemudian dilakukan audit internal untuk mengetahui kekurangan dan perbaikan atas kekurangan tersebut. Bulan Desember 2019 Bappeda dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2015.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah**



PEMERINTAH KABUPATEN
BAPPEDA
BANGKALIS

Yuliasutiningsih, S.H.,M.M.
Pembina Tk I / b
NIP. 196207191992032001